

PENGARUH AKSI TERORISME TERHADAP CITRA PARIWISATA INDONESIA

THE IMPACT OF ACTS OF TERRORISM ON INDONESIA'S DESTINATION IMAGE

Najma Afifa Nurfara*, Dzaky Huda Ari Sumenang Putra

INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

(najmafara16@gmail.com, dzakyyhuda@gmail.com)

*Corresponding Author

Abstrak – Pariwisata merupakan salah satu sektor strategis dalam perekonomian Indonesia, namun sangat rentan terhadap gangguan keamanan, khususnya aksi terorisme. Aksi terorisme tidak hanya menimbulkan kerusakan pada aspek politik dan infrastruktur fisik, tetapi juga berdampak pada penurunan jumlah kunjungan wisatawan, menurunnya rasa aman, serta merusak citra destinasi wisata. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh aksi terorisme terhadap citra pariwisata Indonesia serta merumuskan strategi pemulihan citra pasca kejadian teror. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi dokumentasi. Data dikumpulkan dari berbagai sumber sekunder, termasuk buku, dokumen resmi pemerintah, jurnal ilmiah, artikel, dan sumber daring terpercaya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aksi terorisme memberikan pengaruh negatif terhadap citra pariwisata Indonesia, yang tercermin dari menurunnya kunjungan wisatawan dan pendapatan sektor pariwisata. Strategi yang dapat diterapkan dalam upaya pemulihan citra antara lain peningkatan sistem keamanan, penguatan kapasitas intelijen, strategi pemasaran destinasi, serta kerja sama antara pemerintah dan pemangku kepentingan internasional. Selain itu, partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan, melaporkan potensi ancaman, serta pelaksanaan evaluasi berkala terhadap kebijakan penanggulangan terorisme menjadi bagian integral dalam memperkuat ketahanan sektor pariwisata nasional.

Kata Kunci: Citra pariwisata, pengaruh terorisme, pariwisata, terorisme, keamanan pariwisata

Abstract – Tourism is one of the strategic sectors in Indonesia's economy, yet it remains highly vulnerable to security disruptions, particularly acts of terrorism. Terrorist attacks not only damage political stability and physical infrastructure but also lead to a decline in tourist arrivals, a diminished sense of safety among travellers, and a deteriorating image of the destination. This study aims to analyse the impact of terrorism on Indonesia's tourism image and to formulate strategies for restoring the country's tourism reputation following such incidents. A descriptive qualitative approach was employed using document analysis methods. Data were collected from various secondary sources, including books, official government reports, academic journals, articles, and credible online sources. The findings indicate that acts of terrorism hurt Indonesia's tourism image, resulting in decreased visitor numbers and tourism revenue. Strategies for post-terrorism image recovery include strengthening security systems, enhancing intelligence capabilities, destination marketing, and fostering cooperation between the government and international stakeholders. Moreover, public awareness regarding the importance of maintaining security, reporting potential threats, and conducting regular evaluations of counter-terrorism and tourism recovery policies is essential in building a more resilient tourism sector.

Keywords: Tourism Image, impact of terrorism, tourism, terrorism, security tourism

Pendahuluan

Pariwisata merupakan salah satu sektor penting dalam perekonomian Indonesia karena berkontribusi terhadap

penerimaan devisa, menciptakan lapangan kerja, serta mendorong pembangunan daerah. Namun demikian, sektor ini juga sangat rentan terhadap berbagai gangguan keamanan, termasuk aksi terorisme. Dalam catatan sejarah, Herodotus, seorang penulis perjalanan terkenal, mengungkapkan bahwa ancaman terhadap aktivitas perjalanan dan pariwisata telah muncul sejak zaman kuno. Pada masa itu, bajak laut dan perampok kerap melakukan kekerasan serta intimidasi terhadap para pelancong, yang sering kali berujung pada insiden berbahaya bahkan mematikan (Sr et al., 2018).

Serangan yang dilakukan oleh bangsa Viking dan pasukan Genghis Khan sering dikaitkan dengan elemen terorisme. Tindakan tersebut digunakan sebagai alat menebar ketakutan dan mempercepat tujuan politik. Memasuki abad ke-20 dan ke-21, meningkatnya mobilitas global dan arus wisatawan internasional mendorong kelompok teroris untuk menargetkan wisatawan secara langsung atau menciptakan ketakutan yang menghalangi mereka mengunjungi destinasi populer (Sr et al., 2018). Indonesia, sebagai negara kepulauan dengan sektor pariwisata strategis, tidak luput dari ancaman

tersebut. Salah satu peristiwa paling tragis adalah Bom Bali I pada tahun 2002 (Ibad & Aji, 2020).

Pengeboman tersebut memberikan dampak serius terhadap industri pariwisata di Bali, menyebabkan penurunan signifikan dalam jumlah kunjungan wisatawan mancanegara. Beberapa tahun kemudian, tepatnya pada tahun 2009, Indonesia kembali diguncang serangan teror di Hotel JW Marriott dan Ritz-Carlton, yang menimbulkan kekhawatiran di kalangan wisatawan dan Investor (Safira et al., 2024). Serangkaian kejadian ini menimbulkan pertanyaan mendalam mengenai tingkat keamanan Indonesia sebagai destinasi wisata internasional.

Terorisme, sebagai tindakan kekerasan yang disengaja untuk menciptakan ketakutan dan kepanikan, merupakan ancaman serius bagi sektor pariwisata. Serangan teror tidak hanya merusak infrastruktur seperti bandara, hotel, dan objek wisata, tetapi juga menimbulkan rasa tidak aman di kalangan wisatawan (Sr et al., 2018). Aksi terorisme umumnya dirancang untuk menebar ketakutan demi mencapai tujuan politik atau ideologis tertentu. Sebagai bagian dari strategi perang psikologis, tindakan teror digunakan untuk menakut-nakuti

masyarakat, memecah persatuan, serta memengaruhi keputusan pemerintah (Dahniel, 2023)

Hingga kini, belum terdapat definisi universal mengenai terorisme yang disepakati di tingkat internasional. Perbedaan sistem hukum, politik, dan kepentingan nasional menjadikan setiap negara memiliki interpretasi tersendiri terhadap istilah tersebut (Sr et al., 2018; United Nations Global Counter-Terrorism Strategy, 2017). *United Nations High Commissioner for Human Rights* mengusulkan agar negara-negara mengacu pada unsur dasar dalam mendefinisikan terorisme, yaitu tindakan yang melibatkan intimidasi atau pemaksaan terhadap masyarakat atau pemerintah melalui ancaman atau kekerasan yang menyebabkan kematian, luka serius, atau penyanderaan (United Nations Human Rights Office of the High Commissioner, 2024).

Di Indonesia, terorisme dikategorikan sebagai tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Tindak Pidana Terorisme. Undang-undang tersebut mendefinisikan terorisme sebagai perbuatan menggunakan ancaman atau kekerasan yang menimbulkan suasana teror secara luas, menimbulkan korban massal, atau

merusak objek vital strategis, fasilitas publik, maupun lingkungan hidup, yang berpotensi mengganggu keamanan nasional.

Terorisme dan pariwisata merupakan dua konsep yang saling bertolak belakang. Pariwisata identik dengan rasa aman, keindahan, dan pengalaman positif, sementara terorisme berkaitan dengan kekerasan, ancaman, dan ketidakpastian. Namun demikian, keduanya dapat saling memengaruhi. Llorca-Vivero† (2008) mencatat bahwa hubungan antara terorisme dan pariwisata banyak dikaji dari aspek geografis dan politik, tetapi dampak ekonominya masih kurang mendapat perhatian dalam literatur akademik.

Aksi terorisme biasanya menargetkan infrastruktur publik seperti bandara, jalan raya, atau fasilitas vital lainnya, yang pada akhirnya menghambat mobilitas dan aktivitas wisata (Liu & Pratt, 2017). Dampaknya terhadap pariwisata bersifat tajam namun singkat, karena sorotan media dan perhatian publik yang intens. Sebaliknya, ketidakstabilan politik cenderung memberikan efek jangka panjang yang menghambat perkembangan pariwisata internasional (Sönmez, 1998).

Lokasi yang menjadi sasaran terorisme sering kali mengalami kerusakan citra sebagai destinasi wisata akibat terbentuknya persepsi negatif terhadap keamanan wilayah tersebut (Mansfeld & Pizam, 2006). Berita mengenai aksi teror dapat menimbulkan rasa takut dan kekhawatiran di kalangan wisatawan, membuat mereka enggan berkunjung. Dampak ini sering berlangsung lama dan membutuhkan upaya pemulihan intensif. Edgell et al. (2008) mencatat bahwa peristiwa seperti serangan 11 September 2001 mendorong negara-negara di dunia untuk memperkuat kebijakan keamanan pariwisata secara global.

Meskipun sejumlah kebijakan telah dikembangkan, tantangan terhadap keamanan pariwisata global diperkirakan akan terus berlanjut. Diriye (2015) dalam studi tentang dampak terorisme terhadap pariwisata di Afrika, menekankan bahwa ketakutan yang ditimbulkan oleh serangan teror dapat mengganggu industri pariwisata dengan merusak kebutuhan dasar manusia, yakni rasa aman. Pemerintah sering kali mengeluarkan travel advisory setelah terjadinya insiden teror, sementara liputan media negatif memperburuk citra destinasi dan mengurangi minat

wisatawan untuk berkunjung. Penurunan kunjungan wisatawan ini pada akhirnya berdampak pada perekonomian lokal, lapangan kerja, dan pendapatan negara.

Gangguan terhadap sektor pariwisata akibat terorisme menunjukkan betapa rentannya industri ini terhadap ancaman eksternal. Oleh karena itu, aspek keselamatan dan keamanan menjadi faktor utama dalam menarik serta mempertahankan minat wisatawan. Destinasi wisata perlu menerapkan langkah-langkah keamanan dan strategi manajemen krisis yang efektif untuk mengurangi dampak terorisme sekaligus memberikan rasa aman bagi pengunjung.

Berdasarkan berbagai definisi dan perspektif yang telah diuraikan, terorisme dapat dipahami sebagai tindakan kekerasan oleh individu atau kelompok untuk menimbulkan ketakutan, intimidasi, atau paksaan terhadap masyarakat atau pemerintah, biasanya dengan tujuan politik, ideologis, atau sosial tertentu. Dalam konteks pariwisata, terorisme berdampak signifikan terhadap jumlah kunjungan wisatawan, pendapatan ekonomi, dan citra destinasi. Ketakutan yang ditimbulkan dapat mengubah perilaku wisatawan, yang cenderung menghindari daerah dengan persepsi risiko tinggi.

Di era digital saat ini, ketika informasi menyebar dengan cepat melalui media sosial dan platform daring lainnya, pengelolaan citra pariwisata menjadi semakin krusial dan menantang. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang komprehensif dan adaptif untuk membangun serta memelihara citra positif destinasi, sekaligus menanggulangi dampak negatif isu-isu yang dapat merusak reputasi pariwisata.

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis dampak terorisme terhadap citra Indonesia sebagai destinasi wisata yang aman dan ramah, serta merumuskan strategi pemulihan pasca-terorisme.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai fenomena yang dikaji. Pendekatan ini dipilih karena mampu menggali makna di balik peristiwa, menginterpretasikan dinamika sosial yang kompleks, serta memberikan ruang bagi analisis yang bersifat deskriptif dan interpretatif.

Data dalam penelitian ini bersumber dari data sekunder, yang meliputi literatur akademik, laporan penelitian terdahulu, dokumen kebijakan, publikasi internasional, serta

data resmi dari lembaga pemerintah terkait sektor pariwisata dan keamanan.

Seluruh data dianalisis dengan menggunakan analisis isi (*content analysis*) guna mengidentifikasi tema-tema utama, pola hubungan antarvariabel, serta implikasinya terhadap citra pariwisata Indonesia pascaaksi terorisme.

Proses analisis dilakukan secara bertahap melalui tiga langkah utama, yaitu:

- a. Reduksi data, dengan menyeleksi informasi yang relevan sesuai fokus penelitian;
- b. Penyajian data, dalam bentuk uraian naratif dan tematik yang mencerminkan keterkaitan antara terorisme dan citra pariwisata; dan
- c. Penarikan kesimpulan, melalui interpretasi makna dan sintesis hasil temuan untuk menjawab tujuan penelitian.

Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan dapat memberikan pemahaman yang komprehensif dan reflektif mengenai dampak terorisme terhadap citra destinasi wisata Indonesia, serta strategi yang dapat diterapkan untuk memperkuat kepercayaan wisatawan di masa mendatang.

Hasil dan Pembahasan

Dibandingkan dengan faktor-faktor lain yang dapat mengancam sektor pariwisata, terorisme memiliki dampak yang paling merusak. Hal ini disebabkan oleh sifatnya yang tidak terduga, terencana, dan menyita perhatian publik, serta menimbulkan efek jangka panjang terhadap persepsi wisatawan (Avraham, 2021). Terorisme yang terjadi secara berulang di suatu destinasi dapat merusak citra wilayah tersebut sebagai tempat yang aman dan nyaman, sehingga wisatawan menjadi enggan berkunjung karena kekhawatiran terhadap keselamatan diri (Sönmez, 1998).

Penelitian oleh Dogru-Dastan & Tütüncü (2024), menunjukkan bahwa krisis pariwisata yang dipicu oleh aksi terorisme berdampak negatif secara signifikan terhadap industri pariwisata di Turki. Serangan teroris dan ketegangan politik di kota-kota besar Turki pada periode 2015–2017 menyebabkan penurunan kunjungan wisatawan mancanegara dan penurunan pendapatan pariwisata secara substansial. Temuan ini menegaskan bahwa keberlanjutan sektor pariwisata sangat bergantung pada persepsi keamanan dan stabilitas politik suatu

negara.

Penurunan jumlah wisatawan tidak hanya dipicu oleh rasa takut terhadap ancaman serangan, tetapi juga oleh rusaknya citra destinasi akibat pemberitaan media. Media, baik lokal maupun internasional, sering kali menyoroti peristiwa terorisme secara masif dan sensasional, yang membentuk persepsi negatif publik terhadap suatu destinasi. Citra destinasi yang sebelumnya dikenal karena keindahan alam, kekayaan budaya, dan keramahan penduduk dapat berubah menjadi kesan ketidakamanan dan kekerasan.

Oleh karena itu, penanganan terorisme memerlukan pendekatan multidimensional yang mencakup tindakan represif pascaserangan, upaya pencegahan, serta penanggulangan akar permasalahan. Tindakan represif mencakup peran aparat keamanan dalam proses identifikasi, pengejaran, dan penegakan hukum terhadap pelaku. Selain itu, penguatan sistem keamanan dan intelijen menjadi elemen penting dalam mendukung deteksi dini dan pencegahan serangan.

Kerja sama internasional juga memiliki peran strategis dalam menanggulangi terorisme, khususnya dalam hal pertukaran informasi,

penanganan lintas batas, dan pemutusan jalur pendanaan kelompok teroris. Di sisi lain, konsep bela negara turut berkontribusi dalam memperkuat ketahanan nasional melalui pelibatan masyarakat dalam pencegahan radikalisme, penanaman nilai toleransi, dan pelaporan aktivitas mencurigakan. Penerapan nilai-nilai bela negara memperkuat kesadaran kolektif akan pentingnya persatuan, kesatuan, dan gotong royong dalam menghadapi ancaman yang dapat merusak citra pariwisata dan stabilitas sosial.

Selain menyebabkan penurunan jumlah wisatawan dan pendapatan, terorisme juga merusak citra destinasi dalam jangka panjang. Studi Mirza & Rana (2024) menunjukkan adanya hubungan sebab-akibat yang kuat antara terorisme dan penurunan kinerja pariwisata, dengan dampak ekonomi yang bersifat jangka panjang serta sulit dipulihkan. Kerugian tersebut tidak hanya menimpa sektor pariwisata, tetapi juga berdampak pada perekonomian nasional secara keseluruhan.

Pemerintah berperan penting dalam upaya pencegahan, penegakan hukum, dan pemulihan pasca-terorisme. Kekuatan militer dan aparat keamanan yang tangguh menjadi faktor pencegah

efektif untuk menciptakan rasa aman dan mendukung pembentukan citra positif destinasi wisata (Polyzos et al., 2023).

Di Indonesia, serangkaian peristiwa terorisme telah terjadi, mulai dari pengeboman gereja pada malam Natal tahun 2000, Bom Bali I (2002), Bom JW Marriott (2003), Bom Bali II (2005), hingga serangan bom dan kontak senjata di kawasan Thamrin, Jakarta, pada tahun 2016 (Harruma & Nailufar, 2022). Dari seluruh kejadian tersebut, Bom Bali I menjadi peristiwa paling besar dan berdampak luas. Serangan yang menewaskan 202 orang dan melukai ratusan lainnya tersebut menyebabkan penurunan tajam jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Bali, yang kemudian berimbas pada perekonomian daerah, terutama masyarakat lokal yang bergantung pada sektor pariwisata (Ibad & Aji, 2020).

Serangan lain yang berdampak signifikan adalah peristiwa Pengeboman Mega Kuningan 2009, yang menargetkan Hotel JW Marriott dan Ritz-Carlton di Jakarta. Serangan bom bunuh diri tersebut menewaskan sembilan orang dan melukai lebih dari lima puluh lainnya (Aslam, 2024). Insiden ini juga menyebabkan pembatalan kunjungan

tim sepak bola Manchester United ke Indonesia karena alasan keamanan, memperlihatkan bagaimana ancaman terorisme dapat berdampak langsung pada reputasi internasional suatu negara.

Kejadian serupa juga dialami oleh negara berkembang lain seperti Sri Lanka. Pada 21 April 2019, serangan teroris yang menargetkan gereja dan hotel menewaskan lebih dari 250 orang. Studi oleh P. P. Jayasinghe et al. (2023) menunjukkan bahwa insiden tersebut menyebabkan penurunan drastis jumlah wisatawan internasional dan kerugian ekonomi besar. Citra Sri Lanka sebagai destinasi wisata yang aman terganggu, sehingga diperlukan upaya pemulihan intensif melalui kolaborasi lintas pemangku kepentingan.

Selain aksi terorisme, krisis global seperti pandemi COVID-19 turut memberikan pembelajaran penting mengenai ketahanan sektor pariwisata. Meskipun berbeda secara substansi, pandemi menunjukkan pola serupa dalam menciptakan ketakutan dan ketidakpastian di kalangan wisatawan. Penurunan perjalanan internasional, perubahan perilaku wisatawan, serta meningkatnya perhatian terhadap kesehatan dan keselamatan menjadi

fenomena yang menyerupai dampak terorisme (Gössling et al., 2021). Pandemi ini juga memperlihatkan pentingnya komunikasi yang transparan dan strategi pemasaran adaptif dalam mempercepat pemulihan pariwisata.

Dampak aksi terorisme umumnya lebih besar dirasakan oleh negara berkembang, termasuk Indonesia. Dampak tersebut mencakup penurunan kunjungan wisatawan, meningkatnya kekhawatiran terhadap keamanan, serta penurunan ekonomi lokal. Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat memengaruhi investasi asing dan persepsi global terhadap stabilitas nasional. Media internasional kerap memberitakan peristiwa terorisme di Indonesia secara intensif, sehingga membentuk persepsi negatif terhadap keamanan negara sebagai destinasi (Suherlan, 2017).

Temuan Dogru-Dastan & Tütüncü (2024) di Turki menunjukkan bahwa kekacauan politik dan aksi terorisme dapat merusak citra destinasi wisata secara nasional. Pembelajaran dari kasus tersebut relevan bagi Indonesia, terutama dalam menjaga stabilitas keamanan dan memperkuat citra positif pariwisata di mata dunia.

Sebagai langkah pemulihan, pemerintah Indonesia telah memperkuat

kerangka hukum melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Regulasi ini mempertegas upaya pemerintah dalam mengantisipasi, mencegah, dan memberantas tindak pidana terorisme agar kejadian serupa tidak terulang di masa mendatang. Implementasi kebijakan tersebut mencakup tiga aspek utama:

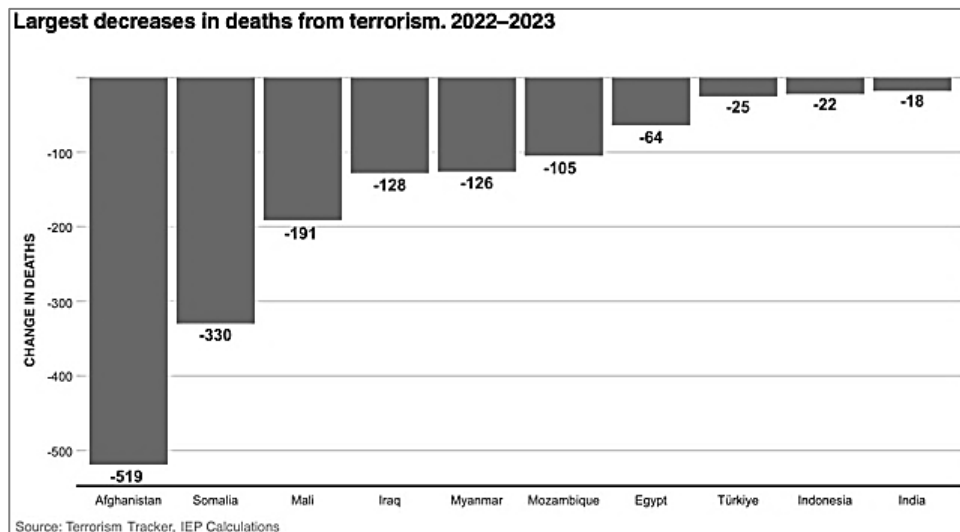
- a. Pencegahan terorisme, melalui program deradikalisasi, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial bagi mantan narapidana terorisme;
- b. Pemberantasan, meliputi proses penangkapan, penahanan, dan peradilan terhadap pelaku; dan
- c. Perlindungan korban, berupa bantuan hukum, rehabilitasi, dan kompensasi yang layak.

Selain itu, pemerintah juga memperkuat sejumlah regulasi pendukung, termasuk peraturan pemerintah dan keputusan presiden yang berfokus pada peningkatan keamanan di destinasi wisata, penyediaan informasi akurat mengenai situasi keamanan, serta strategi

pencitraan ulang destinasi pariwisata. Upaya ini dapat diperkuat melalui kolaborasi dengan influencer dan pembuat konten di media sosial untuk mempromosikan destinasi secara positif, serta dengan respons aktif terhadap komentar publik guna mencegah penyebaran informasi yang keliru (Dogru-Dastan & Tütüncü, 2024).

Keterlibatan seluruh pemangku kepentingan menjadi faktor kunci dalam keberhasilan strategi pencegahan terorisme. Pemerintah daerah perlu bekerja sama dengan lembaga-lembaga khusus seperti Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian Republik Indonesia (POLRI), dan mitra internasional (Safira et al., 2024).

Adapun Gambar 1 berikut berjudul *Largest Decreases in Deaths from Terrorism, 2022–2023* yang dipublikasikan oleh *Institute for Economics & Peace* (2024), menunjukkan penurunan jumlah korban jiwa akibat aksi terorisme di berbagai negara, termasuk Indonesia, yang menunjukkan tren positif dalam upaya global menekan tingkat kekerasan berbasis teror.



Gambar 1. *The largest decreases in deaths from terrorism*
 Sumber: The Institute for Economics & Peace (IEP), 2024

Berdasarkan Gambar 1, terlihat adanya penurunan jumlah kematian akibat aksi terorisme di sejumlah negara. Negara seperti Afghanistan, Nigeria, dan Somalia menunjukkan penurunan paling signifikan, yang mencerminkan keberhasilan strategi kontra-terorisme serta peningkatan kapasitas keamanan nasional. Dalam konteks Indonesia, data menunjukkan penurunan korban jiwa akibat terorisme sebanyak 18 orang dari tahun 2022 ke 2023.

Walaupun angka tersebut belum sebesar penurunan di negara-negara dengan tingkat ancaman yang lebih tinggi, tren ini tetap memberikan sinyal positif. Artinya, upaya pemerintah dan aparat keamanan dalam mencegah serta menanggulangi ancaman terorisme mulai menunjukkan hasil nyata. Namun

demikian, tantangan masih ada, terutama dalam mencegah radikalisasi dan menjaga kewaspadaan publik terhadap potensi serangan baru.

Dari sisi pariwisata, perkembangan ini menjadi indikator penting karena keamanan merupakan faktor utama yang memengaruhi persepsi wisatawan terhadap suatu destinasi. Seperti dikemukakan oleh Pizam et al. (2002) dalam Dogru-Dastan & Tütüncü (2024), citra pariwisata umumnya dapat pulih dalam kurun waktu enam hingga dua belas bulan setelah insiden terorisme, asalkan tidak terjadi peristiwa serupa dalam waktu dekat. Oleh sebab itu, menjaga stabilitas keamanan dan membangun kembali kepercayaan publik menjadi langkah strategis dalam memulihkan sektor pariwisata sekaligus

mempertahankan citra positif Indonesia sebagai destinasi yang aman dan ramah.

Beberapa negara telah menunjukkan keberhasilan dalam memulihkan sektor pariwisata pasca serangan teror melalui strategi adaptif yang terencana. Sri Lanka, misalnya, mengembangkan pendekatan manajemen krisis yang terbagi atas dua tahap, yaitu jangka pendek dan jangka panjang. Pendekatan ini tidak hanya memperkuat kesiapan menghadapi krisis, tetapi juga membangun kerangka kerja kolaboratif antar lembaga untuk merespons situasi darurat secara lebih efektif.

Strategi tersebut mencakup peningkatan sistem keamanan, pelaksanaan kampanye pemasaran positif untuk menarik kembali wisatawan, serta perbaikan infrastruktur dan fasilitas pariwisata guna menjamin kenyamanan dan keselamatan. Selain itu, kerja sama antarnegara berperan penting dalam memperkuat pertukaran informasi intelijen dan strategi pencegahan terorisme lintas batas.

Inovasi teknologi juga turut mempercepat proses pemulihan. Pengembangan aplikasi digital pariwisata yang menyediakan informasi keamanan secara real-time membantu wisatawan memperoleh rasa aman dan kepercayaan

terhadap destinasi yang dikunjungi. Inovasi ini menunjukkan bahwa pengelolaan krisis di era digital tidak hanya bergantung pada kebijakan pemerintah, tetapi juga pada kemampuan sektor pariwisata untuk beradaptasi dengan teknologi dan kebutuhan wisatawan global.

Dengan demikian, kolaborasi menyeluruh antar pemangku kepentingan yang melibatkan pemerintah, aparat keamanan, pelaku industri pariwisata, media, dan masyarakat menjadi kunci utama dalam menjaga ketahanan sektor pariwisata. Upaya bersama ini tidak hanya berfungsi memulihkan citra Indonesia di mata dunia, tetapi juga memperkuat fondasi ketahanan nasional dalam menghadapi ancaman terorisme yang terus berkembang secara dinamis.

Kesimpulan, Rekomendasi, dan Pembatasan

Peristiwa terorisme seperti Bom Bali 2002 dan bom Jakarta 2009 memberikan dampak yang sangat signifikan terhadap industri pariwisata Indonesia. Dampak tersebut tidak hanya terlihat dari penurunan jumlah kunjungan wisatawan, tetapi juga dari rusaknya citra keamanan destinasi pariwisata di mata dunia. Selain kerugian ekonomi, aspek psikologis masyarakat

dan wisatawan turut terganggu, diperburuk oleh pemberitaan media yang membentuk persepsi negatif secara berkepanjangan. Temuan ini menunjukkan bahwa ancaman terorisme memiliki implikasi multidimensi yang memerlukan respons komprehensif dan berkelanjutan.

Meskipun Indonesia telah mengambil berbagai langkah dalam menanggulangi terorisme, strategi yang lebih terkoordinasi dan berorientasi jangka panjang masih dibutuhkan. Pemerintah perlu memperkuat sistem keamanan di destinasi wisata dan ruang publik, disertai peningkatan kapasitas aparat serta pelaku industri pariwisata melalui simulasi dan pelatihan rutin. Di sisi lain, pelibatan masyarakat menjadi aspek penting melalui program deradikalisasi dan pendidikan kewarganegaraan yang menumbuhkan kesadaran kolektif akan pentingnya stabilitas keamanan. Upaya peningkatan literasi keamanan publik juga perlu dilakukan agar masyarakat dapat berperan aktif dalam mencegah dan melaporkan potensi ancaman di lingkungannya. Selain itu, evaluasi berkala terhadap efektivitas strategi penanggulangan dan pemulihan citra

destinasi wisata harus terus dilakukan untuk memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan tetap relevan dengan dinamika ancaman dan kebutuhan industri pariwisata global. Dengan demikian, kolaborasi antara pemerintah, aparat keamanan, pelaku industri, dan masyarakat diharapkan mampu memperkuat ketahanan nasional sekaligus memulihkan citra Indonesia sebagai negara yang aman dan ramah bagi wisatawan.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Kajian belum menelaah secara mendalam efektivitas implementasi strategi penanggulangan terorisme di tingkat lokal, serta belum melibatkan persepsi langsung dari wisatawan terhadap langkah-langkah pemulihan pasca-teror. Untuk itu, penelitian lanjutan disarankan meninjau efektivitas kebijakan tersebut dalam jangka panjang, sekaligus mengkaji peran teknologi digital dan media sosial dalam mempercepat proses pemulihan citra destinasi terdampak.

Daftar Pustaka

Aslam, I. J. (2024, July 17). *Tragedi Bom Jakarta 2009, Gagalkan Kedatangan Manchester United, tapi Tidak Tim Lainnya*. Goodnewsfromindonesia. <https://www.goodnewsfromindonesia>

sia.id/2024/07/17/tragedi-bom-jakarta-2009-yang-menggagalkan-kedatangan-manchester-united-ke-indonesia

- Avraham, E. (2021). Combating tourism crisis following terror attacks: image repair strategies for European destinations since 2014. *Current Issues in Tourism*, 24(8), 1079–1092. <https://doi.org/10.1080/13683500.2020.1764510>
- Dahniel, M. R. A. (2023). *Memahami Ancaman Radikalisme dan Terorisme di Indonesia*. https://base.api.ikhub.org/assets/Organisasi/34edee04-2bb4-4e0a-93fa-dacc076e0665/files/Badan_Nasional_Penanggulangan_Terrorisme-Paper_Kepala_BNPT_RI_-_Memahami_Ancaman_Radikalisme_dan_Terrorisme_di_Indonesia.pdf
- Diriye, H. G. (2015). *The effect of terrorism on tourism in Africa in the 21st century: A case study of Kenya* [University of Nairobi]. <https://erepository.uonbi.ac.ke/handle/11295/94826>
- Dogru-Dastan, H., & Tütüncü, Ö. (2024). Impacts of the terrorist attacks and political incidents in major cities on tourism industry: Evidence from the tourism managers in Turkey. *Cities*, 153, 105255. <https://doi.org/10.1016/j.cities.2024.105255>
- Edgell, D. L., Allen, M. D., Smith, G., & Swanson, J. (2008). *Tourism Policy and Planning: Yesterday, Today, and Tomorrow* (1st ed.). Taylor & Francis Group. <https://books.google.co.id/books?id=JbwJBAAQBAJ>
- Gössling, S., Scott, D., & Hall, C. M. (2021). Pandemics, tourism and global change: a rapid assessment of COVID-19. *Journal of Sustainable Tourism*, 29(1), 1–20. <https://doi.org/10.1080/09669582.2020.1758708>
- Harruma, I., & Nailufar, N. N. (2022, April 28). 7 Kasus Terorisme Terbesar di Indonesia. Kompas. https://nasional.kompas.com/read/2022/04/28/01300071/7-kasus-terorisme-terbesar-di-indonesia?page=all#google_vignette
- Ibad, M. S., & Aji, T. N. (2020). Bom Bali 2002. *Avatara: Jurnal Pendidikan Sejarah*, 9(1–14). <https://doi.org/https://jurnalmahasiswa.unesa.ac.id/index.php/avatara/article/view/34379/30585>
- Liu, A., & Pratt, S. (2017). Tourism's vulnerability and resilience to terrorism. *Tourism Management*, 60, 404–417. <https://doi.org/10.1016/j.tourman.2017.01.001>
- Llorca-Vivero†, R. (2008). Terrorism and International Tourism: New Evidence. *Defence and Peace Economics*, 19(2), 169–188. <https://doi.org/10.1080/10242690701453917>
- Mansfeld, Y., & Pizam, A. (2006). *Tourism, Security and Safety* (Y. Mansfeld & A. Pizam (eds.); 1st ed.). Routledge. <https://doi.org/10.4324/9780080458335>
- Mirza, M. N. E. E., & Rana, I. A. (2024). A systematic review of urban terrorism literature: Root causes, thematic trends, and future directions. *Journal of Safety Science and Resilience*, 5(3), 249–265. <https://doi.org/10.1016/j.jnlssr.2024.03.006>

- P. P. Jayasinghe, G. W. J. S. Fernando, & H. A. K. N. S. Surangi. (2023). Post-crisis recovery management of tourism: Lesson Learnt from the Easter Sunday attack in Sri Lanka. *Vidyodaya Journal of Management*, 9(1).
<https://doi.org/10.31357/vjm.v9il.6371>
- Pizam, A., Fleischer, A., & Mansfeld, Y. (2002). Tourism and Social Change: The Case of Israeli Ecotourists Visiting Jordan. *Journal of Travel Research*, 41(2), 177–184.
<https://doi.org/10.1177/004728702237423>
- Polyzos, S., Papadopoulou, G., & Xesfingi, S. (2023). Examining the link between terrorism and tourism demand: the case of Egypt. *Journal of Policy Research in Tourism, Leisure and Events*, 15(1), 69–87.
<https://doi.org/10.1080/19407963.2021.1904965>
- Safira, I., Sulaeman, W. A., & Wahyudi, S. T. (2024). Konsep Bela Negara dalam penanggulangan Tindak Pidana Terorisme JW Marriott dan Ritz Carlton. *Journal of Creative Student Research*, 2(6), 190–200.
<https://doi.org/10.55606/jcsr-politama.v2i6.4624>
- Sönmez, S. F. (1998). Tourism, terrorism, and political instability. *Annals of Tourism Research*, 25(2), 416–456.
[https://doi.org/10.1016/S0160-7383\(97\)00093-5](https://doi.org/10.1016/S0160-7383(97)00093-5)
- Sr, D. L. E., Swanson, J. R., David L. Edgell, S., Allen, M. D., & Smith, G. (2018). *Tourism Policy and Planning Yesterday, Today, and Tomorrow* (3rd ed.). Routledge.
- Suherlan, H. (2017). *Analisis Faktor-Faktor Pembentuk Citra Borobudur*.
https://stp-bandung.ac.id/repository-sub/bitstream/handle/123456789/361/Analisis_Faktor-faktor_Pembentuk_Citra_Borobudur_sequence-1-isAllowed-y.pdf
- The Institute for Economics & Peace (IEP). (2024). Global Terrorism Index 2024. In S. Stroobants (Ed.), *Measuring the impact of terrorism* (11th ed.). Springer Nature Switzerland.
- United Nations Global Counter-Terrorism Strategy. (2017). *Capability of the United Nations system to assist Member States in Implementing the United Nations Global Counter-Terrorism Strategy*.
- United Nations Human Rights Office of the High Commissioner. (2024, August 7). *A/HRC/57/29: Terrorism and human rights | OHCHR*. United Nations.
<https://www.ohchr.org/en/documents/thematic-reports/ahrc5729-terrorism-and-human-rights>